



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp. (0265) 543342 Faks (0265) 543340
Website : bappelitbangda.tasikmalayakab.go.id Email : bappelitbangda@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 000.7.2/KEP.1296/Bapp/2025

tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Tahun 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini : dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaparna
pada tanggal : 4 Juli 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. RUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670918 198903 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 000.7.2/KEP.1296/Bapp/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERUBAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025

Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Sekretaris : Fungsional Perencana pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Kepala Sub Bidang Statistik Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
9. Fungsional Perencana dan Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
10. Pelaksana pada Perencanaan Evaluasi Pelaporan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Singaparna
pada tanggal : 4 Juli 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. PUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd.

Penyaha Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670918 198903 1 007

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 000.7.2/KEP.1296/Bapp/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERUBAHAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN 2025.

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025

PENANGGUNGJAWAB

Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

KETUA

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.

SEKRETARIS

- Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;
- Mempersiapkan segala fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

ANGGOTA

- Menyiapkan bahan, data dan informasi terkait.
- Menyusun dan mengumpulkan perubahan rencana kerja masing-masing unit kerja sesuai tugas dan fungsi sebagai bahan perubahan rencana kerja.

- Menyiapkan kelengkapan seluruh bahan/materi dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;
- Melakukan telaahan dan analisis data pada Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;
- Melaksanakan penyempurnaan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Ditetapkan di : Singaparna
pada tanggal : 4 Juli 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. PUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd.

Penyempurnaan Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670918 198903 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu juga mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran Pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Pergantian Daerah Tahun Anggaran 2025.

Semoga dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini dapat menghasilkan perencanaan yang implementatif, akuntabel dan berorientasi kinerja.

Singaparna, 23 Juli 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. RUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd.
Peneliti Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670918 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA KABUPATEN TASIKMALAYA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025.....	II-1
2.2. Hasil Evaluasi Kesesuaian Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025 Terhadap APBD Tahun 2025.....	II-31
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	III-1
3.2. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	III-2
3.3. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2025.....	III-3
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan I Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.....	II-2
Tabel 2.2.	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Triwulan I Tahun Anggaran 2025.....	II-22
Tabel 2.3.	Kesesuaian Renja Bappelitbangda Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025.....	II-33
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	III-1
Tabel 3.2.	Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	III-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini adalah Perubahan Rencana Kerja tahun 2025. Selanjutnya, Dokumen Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2025 memuat Program/ kegiatan tahun 2025, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2026.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan. Perubahan dilakukan akibat adanya ketidaksesuaian rencana kerja dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta perubahan kebijakan nasional dan provinsi, sehingga mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah secara langsung maupun tidak langsung. Menindaklanjuti hal tersebut, penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dilakukan dengan adanya penyesuaian indikator kinerja, pagu indikatif, target kinerja, dengan mempertimbangkan realisasi kinerja yang melebihi target di tahun sebelumnya, dan merujuk pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029 serta memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Disamping itu juga Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360).

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2025 telah melalui proses penyusunan dan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yaitu pembahasan internal Bappelitbangda khususnya tim penyusun Dokumen Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2025, hal ini guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya Perubahan Renja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Tahun 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya

- Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
 32. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
 33. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 34. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;
 35. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya

Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;

36. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor : 0018 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan dalam satu tahun anggaran dan mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah serta menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Adapun tujuannya adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;
2. Sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan perubahan program dan kegiatan tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan

Bappelitbangda agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA KABUPATEN TASIKMALAYA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan I tahun 2025.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025

Bab ini memuat rencana perubahan program, kegiatan, serta kebutuhan dana dan pagu indikatif Bappelitbangda Tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat catatan-catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BAPPELITBANGDA KABUPATEN TASIKMALAYA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Target capaian kinerja ditetapkan dalam Renstra untuk jangka waktu lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam Renja. Pada tahun 2025 jumlah program yang dilaksanakan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya adalah sebanyak 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Renja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan Triwulan I terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2025.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2025 yang melaksanakan 3 urusan penunjang pemerintahan yaitu urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan serta urusan statistik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.686.028.249,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 1.682.569.051,- atau 12,29%. Pencapaian realisasi anggaran triwulan I relatif rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang dipihak ketigakan masih dalam proses pelaksanaan, sehingga berimbas pada pencapaian target kinerja. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis sebagai berikut realisasi anggaran sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2.1.
Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan I
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2025

NO.	URAIAN (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I		
			KEUANGAN (Rp.)	Keu. (%)	Fisik (%)
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	173.573.600	29.876.000	17,21	25
	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	173.573.600	29.876.000	17,21	25
	a. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	173.573.600	29.876.000	17,21	25
II.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.014.853.829	1.414.387.315	12,84	19,17
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	176.222.800	28.459.080	16,15	25
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108.494.000	24.853.680	22,91	25
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.728.800	3.605.400	5,32	25
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.922.171.955	1.169.540.359	14,76	25
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.885.312.955	1.164.325.359	14,77	25
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.859.000	5.215.000	14,15	25
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	677.188.965	52.602.514	7,77	25
	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.962.965	18.550.650	9,01	25
	b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.135.800	4.960.000	14,12	25
	c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.200.000	12.360.000	23,23	25

NO.	URAIAN (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)		PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I		
				KEUANGAN (Rp.)	Keu. (%)	Fisik (%)
	d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.600.000	0	0	25
	e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321.290.200	16.731.864	5,21	25
	4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.848.664	0	0	0
	a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.848.664	0	0	0
	5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.293.737.100	132.910.362	10,27	25
	a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	496.637.100	64.110.362	12,91	25
	b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	797.100.000	68.800.000	8,63	25
	6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	889.684.345	30.875.000	3,47	15
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.675.000	10.000.000	2,85	20
	b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.525.000	20.875.000	12,31	20
	c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169.588.000	0	0	20
	d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.896.345	0	0	0
III.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		984.295.400	93.882.700	9,54	37,96
	1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	850.243.800	77.921.700	9,16	66,38
	a.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	41.166.500	3.250.000	7,89	33,30

NO.	URAIAN (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)		PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I		
				KEUANGAN (Rp.)	Keu. (%)	Fisik (%)
	b.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	246.561.500	10.090.000	4,09	40
	c.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	74.032.800	15.122.000	20,43	100
	d.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	181.398.000	1.625.000	0,90	100
	e.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	44.345.000	39.674.700	89,47	100
	f.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	262.740.000	8.160.000	3,11	25
	2.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	84.852.600	0	0	12,50
	a.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	71.420.000	0	0	25
	b.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	13.432.600	0	0	0
	3.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	49.199.000	15.961.000	32,44	35
	a.	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	49.199.000	15.961.000	32,44	35
IV.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1.115.079.820	121.732.036	10,92	17,92
	1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	426.718.320	44.092.536	10,33	16,25
	a.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	156.901.320	17.201.000	10,96	20

NO.	URAIAN (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I		
			KEUANGAN (Rp.)	Keu. (%)	Fisik (%)
	b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11.045.000	0	0	0
	c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	17.478.200	0	0	12,50
	d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	215.820.200	25.636.536	11,88	20
	e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11.003.000	0	0	0
	f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.470.600	1.255.000	8,67	12,50
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	361.904.200	41.030.500	11,34	16,88
	a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	135.220.000	10.493.000	7,76	20
	b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11.972.800	0	0	0
	c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	22.844.000	3.000.000	13,13	15
	d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	152.830.200	24.537.500	16,06	20
	e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11.973.000	0	0	0
	f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	27.064.200	3.000.000	11,08	12,50

NO.	URAIAN (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I		
			KEUANGAN (Rp.)	Keu. (%)	Fisik (%)
3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	326.457.300	36.609.000	11,21	20,63
a.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	129.856.300	14.544.000	11,20	20
b.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20.164.000	0	0	0
c.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	19.528.000	5.044.000	25,83	30
d.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	116.951.200	17.021.000	14,55	20
e.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20.069.200	0	0	0
f.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	19.888.600	0	0	12,50
V.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	398.225.600	22.691.000	5,70	15
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	13.547.200	0	0	10
a.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	13.547.200	0	0	10
2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	135.439.000	5.978.000	4,41	10
a.	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	135.439.000	5.978.000	4,41	10

NO.	URAIAN (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I		
			KEUANGAN (Rp.)	Keu. (%)	Fisik (%)
3.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	249.239.400	16.713.000	6,71	25
a.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	220.757.200	14.604.000	6,62	25
b.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	28.482.200	2.109.000	7,40	25
TOTAL		13.686.028.249	1.682.569.051	12,29	23,01

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 176.222.800,- . Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 28.459.080,- atau 16,15%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 108.494.000,-, adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 24.853.680,- atau 22,91%. Realisasi output baru tercapai 25% sesuai dengan target pada triwulan I. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 67.728.800,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 3.605.400,- atau 5,32%. Realisasi output baru tercapai 25% sesuai dengan target pada triwulan I. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 7.922.171.955,- adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 1.169.540.359,- atau 14,76%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 7.885.312.955,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 1.164.325.359,- atau 14,77%. Realisasi output baru tercapai 25% sesuai dengan target pada triwulan I. Pembayaran gaji dan tunjangan tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan jumlah ASN.

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 36.859.000,-, adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 5.215.000,- atau 14,15%. Realisasi output baru tercapai 25% sesuai dengan target pada triwulan I. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 677.188.965,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 52.602.514,- atau 7,77%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 205.962.965,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 18.550.650,- atau 9,01%. Realisasi output baru tercapai 25% sesuai dengan target pada triwulan I. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan.
- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 35.135.800,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 4.960.000,- atau 14,12%. Realisasi output baru tercapai 25% sesuai dengan target pada triwulan I. Belanja cetak dan penggandaan menyesuaikan dengan kebutuhan. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan.
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 53.200.000,-, adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 12.360.000,- atau 23,23%. Realisasi output baru tercapai 25% sesuai dengan target pada triwulan I. Belanja Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan menyesuaikan dengan kebutuhan, dimana tagihan surat

kabar oleh penyedia jasa dimintakan pada bulan berjalan. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan.

- 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 61.600.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0,- atau 0%. Realisasi output baru tercapai 25% sesuai dengan target pada triwulan I. Belanja ini menyesuaikan dengan kebutuhan.
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 321.290.200,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 16.731.864,- atau 5,21%. Realisasi output baru tercapai 25%. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 55.848.664 ,- . Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I masih 0%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 55.848.664,- . Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I masih 0%. Hal ini dikarenakan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilakukan efisiensi dan tidak akan dilaksanakan.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.293.737.100,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 132.910.362,- atau 10,27%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

dengan anggaran sebesar Rp. 496.637.100,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 64.110.362,- atau 12,91%. Realisasi output baru tercapai 25%, dimana belanja/pengeluaran telepon, air, listrik dan dan internet menyesuaikan dengan kebutuhan.

- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 797.100.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 68.800.000,- atau 8,63%. Realisasi output baru tercapai 25% sesuai dengan target pada triwulan I.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 889.684.345,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 30.875.000,- atau 3,47%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 350.675.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 10.000.000,- atau 2,85%. Realisasi output baru tercapai 20%. Hal ini disebabkan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan baik untuk BBM maupun untuk suku cadang.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 169.525.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 20.875.000,- atau 12,31%. Realisasi output baru tercapai 20%. Hal ini disebabkan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan baik untuk BBM maupun untuk suku cadang.
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 169.588.000,-. Adapun realisasi

anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0,-. Realisasi output baru tercapai 20%. Hal ini disebabkan karena belanja/pengeluaran menyesuaikan dengan kebutuhan.

- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 199.896.345,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I masih 0%, karena anggaran kas dilaksanakan pada triwulan II sehingga belum ada realisasi. Realisasi output juga masih 0%, karena pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada triwulan II.

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan anggaran sebesar Rp. 850.243.800,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp.77.921.700,- atau 9,16%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 41.166.500,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 3.250.000,- atau 7,89%. Capaian output sebesar 33,30%, keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kelola yang baik.
- 2) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 246.561.500,- adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 10.090.000,- atau 4,09%. Capaian output sebesar 40%, keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kelola yang baik.
- 3) Pelaksanaan Konsultasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 74.032.800,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 15.122.000,- atau 20,43%.

Realisasi output tercapai 100%, keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kelola yang baik. Pekerjaan untuk Sub Kegiatan ini sudah selesai di Triwulan I.

- 4) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 181.398.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 1.625.000,- atau 0,90%. Realisasi output tercapai 100%, keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kelola yang baik. Pekerjaan untuk Sub Kegiatan ini sudah selesai di Triwulan I.
- 5) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 44.345.000,- adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 39.674.700,- atau 89,47%. Realisasi output tercapai 100%, keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kelola yang baik. Pekerjaan untuk Sub Kegiatan ini sudah selesai di Triwulan I.
- 6) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 262.740.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 8.160.000,- atau 3,11%. Realisasi output tercapai 25%, keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kelola yang baik.

b. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 84.852.600,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0,- atau 0%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 71.420.000,-. Adapun realisasi anggaran

sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0,- atau 0% dan realisasi output tercapai 25%, Hal ini dikarenakan kegiatan dilaksanakan pada triwulan II.

- 2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 13.432.600,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I masih 0%. Hal ini dikarenakan kegiatan dilaksanakan pada triwulan II.

c. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 49.199.000,- adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 15.961.000,- atau 32,44%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 49.199.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 15.961.000,- atau 32,44%. Realisasi output tercapai 35%, keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kelola yang baik.

3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan anggaran sebesar Rp. 426.718.320,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 44.092.536,- atau 10,33%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 156.901.320,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 17.201.000,- atau 10,96%. Realisasi

output tercapai 20%. Keberhasilan ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 11.045.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0,- atau 0%. Realisasi output tercapai 0%. Hal ini dikarenakan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dilakukan efisiensi dan tidak akan dilaksanakan.
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 17.478.200,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0,- atau 0% dan Realisasi output tercapai 12,50%. Hal ini dikarenakan kegiatan dilaksanakan pada triwulan II.
- 4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 215.820.200,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 25.636.536,- atau 11,88%. Realisasi output tercapai 20%. Keberhasilan ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 5) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan anggaran sebesar Rp. 11.003.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0,- atau 0%. Realisasi output tercapai 0%. Hal ini dikarenakan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dilakukan efisiensi dan

tidak akan dilaksanakan.

- 6) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan anggaran sebesar Rp. 14.470.600,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 1.255.000,- atau 8,67%. Realisasi output tercapai 12,50%. Keberhasilan ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan anggaran sebesar Rp. 361.904.200,- adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 41.030.500,- atau 11,34%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 135.220.000,-, adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 10.493.000,- atau 7,76%. Realisasi output tercapai 20%. Keberhasilan ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp. 11.972.800,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0,- atau 0%. Realisasi output tercapai 0%. Hal ini dikarenakan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilakukan efisiensi dan tidak akan dilaksanakan.
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp.

22.844.000,-, adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 3.000.000,- atau 13,13%. Realisasi output tercapai 15%. Keberhasilan ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- 4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 152.830.200,- adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 24.537.500,- atau 16,06%. Realisasi output tercapai 20%. Keberhasilan ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 5) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan anggaran sebesar Rp. 11.973.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0,- atau 0%. Realisasi output tercapai 0%. Hal ini dikarenakan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilakukan efisiensi dan tidak akan dilaksanakan.
- 6) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan anggaran sebesar Rp. 27.064.200,-, adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 3.000.000,- atau 11,08%. Realisasi output tercapai 12,50%. Keberhasilan ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan anggaran sebesar Rp. 326.457.300,- adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 36.609.000,- atau 11,21%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 129.856.300,-, adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 14.544.000,- atau 11,20%. Realisasi output tercapai 20%. Keberhasilan ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp. 20.164.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0,- atau 0%. Realisasi output tercapai 0%. Hal ini dikarenakan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dilakukan efisiensi dan tidak akan dilaksanakan.
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp. 19.528.000,-, adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 5.044.000,- atau 25,83%. Realisasi output tercapai 30%. Keberhasilan ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 116.951.200,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 17.021.000,- atau 14,55%. Realisasi output tercapai 20%. Keberhasilan ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 5) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

dengan anggaran sebesar Rp. 20.069.200,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0,- atau 0%. Realisasi output tercapai 0%. Hal ini dikarenakan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dilakukan efisiensi dan tidak akan dilaksanakan.

- 6) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan anggaran sebesar Rp. 19.888.600,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 0,- atau 0% dan Realisasi output tercapai 12,50%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada triwulan II.

4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan anggaran sebesar Rp. 13.547.200,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0,- atau 0%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp. 13.547.200,-, adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0,- atau 0%. Realisasi output baru tercapai 10%. Hal ini disebabkan belanja kegiatan baru sampai tahap koordinasi dan penyampaian surat permintaan data. Target pelaksanaan kajian penelitian pada triwulan II.

b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 135.439.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar

Rp.5.978.000,- atau 4,41%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 135.439.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 5.978.000,- atau 4,41%. Realisasi output sudah tercapai 10%. Hal ini disebabkan belanja kegiatan baru sampai tahap koordinasi dan penyampaian surat permintaan data. Target pelaksanaan kajian penelitian pada triwulan II.

c. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan anggaran sebesar Rp. 249.239.400,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp.16.713.000,- atau 6,71%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif dengan anggaran sebesar Rp. 220.757.200,- adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 14.604.000,- atau 6,62%. Realisasi output sudah tercapai 25%. Keberhasilan ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 2) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dengan anggaran sebesar Rp. 28.482.200,- adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 2.109.000,- atau 7,40%. Realisasi output sudah tercapai 25%. Keberhasilan ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 173.573.600,- adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 29.876.000,- atau 17,21%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 173.573.600,- adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 29.876.000,- atau 17,21%. Realisasi output baru tercapai 25%. Keberhasilan ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dari laporan realisasi anggaran yaitu 5 (lima) program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian program kegiatan berdasarkan realisasi triwulan I sebesar 12,29%.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 disusun dan dilaksanakan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Secara khusus, sebagai wujud konkret atas pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan. Dana yang digunakan untuk membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Adapun rekapitulasi evaluasi terhadap hasil Renja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan Triwulan I ditunjukkan pada Tabel di bawah ini :

No	Kode	Sasaran (RPJMD/Renstra)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 (Kumulatif 2021-2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024) n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang direvisasi n-1		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang direvisasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Keterangan						
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp			K	Rp				
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 9-10-11+12		14 = 9-10-11+12/8*100%		15 = 7-13		16 = 15/6*100%		17	18		
				Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam (SDA)	%	500	4,710,155,154	300	1,023,076,661	100	665,500,000	0	41,030,500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	41,030,500	16.25%	6.17%	300	1,064,107,161	60.00%	22.59%	Bidang PSDA	
				Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam (SDA)	%	500	5,831,349,504	300	1,462,832,507	100	678,250,000	0	36,609,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	36,609,000	16.25%	5.40%	300	1,499,441,507	60.00%	23.71%	Bidang IKE	
5	01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	17	5,038,796,230	3	1,221,885,667	8	865,500,324	0	97,370,486	0	-	0	-	0	-	0	97,370,486	16.25%	11.25%	3	1,319,256,153	17.65%	26.18%	Bidang PPM		
				Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	227	-	0	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan SKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan SKPD)	Dokumen	17	2,123,126,325	5	238,077,069	5	310,500,324	0	17,201,000	0	-	0	-	0	-	0	17,201,000	20.00%	5.54%	5	255,278,069	29.41%	12.02%	Bidang PPM	
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	144	153,020,000	0	-	9	25,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%	Bidang PPM	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	211	246,476,230	9	29,066,000	9	30,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12.50%	0.00%	9	29,066,000	4.27%	11.79%	Bidang PPM	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	17	2,134,683,415	6	265,325,015	5	450,000,000	0	78,914,486	0	-	0	-	0	-	0	78,914,486	20.00%	17.54%	6	344,239,501	35.29%	16.13%	Bidang PPM	
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	9	153,020,000	0	-	3	20,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%	Bidang PPM	
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	12	228,470,260	3	100,566,350	3	30,000,000	0	1,255,000	0	-	0	-	0	-	0	1,255,000	12.50%	4.18%	3	101,821,350	25.00%	44.57%	Bidang PPM	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																					16.28%	11.54%			32.38%	14.07%					
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode					Sasaran (RPJMD/Renstra)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 (Kumulatif 2021-2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024) n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi n-1		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Keterangan
																I		II		III		IV											
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14=9-10/8*100%	15=7+13	16=15/6*100%	17	18																
5	01	03	2.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Pembangunan lingkup Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam (SDA)	Dokumen	17	4,710,155,154	1	500,147,200	8	665,500,000	0	41,030,500	0	0	0	0	0	0	41,030,500	16.25%	6.17%	1	541,177,700	5.88%	11.49%	Bidang PSDA			
							Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan lingkup Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam (SDA)	Dokumen	36		5		5		0								0				5						
5	01	03	2.02	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	17	1,987,353,000	5	219,957,600	5	287,000,000	0	10,493,000							0	10,493,000	20.00%	3.66%	5	230,450,600	29.41%	11.60%	Bidang PSDA		
5	01	03	2.02	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	Perangkat Daerah	12	153,020,000	0	-	3	19,000,000	0	-							0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%	Bidang PSDA		
5	01	03	2.02	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	Perangkat Daerah	15	227,895,789	3	29,999,800	3	29,000,000	0	3,000,000							0	3,000,000	12.50%	10.34%	3	32,999,800	20.00%	14.48%	Bidang PSDA		
5	01	03	2.02	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	17	1,966,112,332	5	215,189,800	5	286,500,000	0	24,537,500							0	24,537,500	20.00%	8.56%	5	239,727,300	29.41%	12.19%	Bidang PSDA		
5	01	03	2.02	06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	8	153,020,000	0	-	2	17,000,000	0	-							0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%	Bidang PSDA		
5	01	03	2.02	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	10	222,754,033	2	35,000,000	2	27,000,000	0	3,000,000							0	3,000,000	12.50%	11.11%	2	38,000,000	20.00%	17.06%	Bidang PSDA		
													Rate-rata capaian kinerja Kegiatan (%)				16.25%	6.11%			29.41%	11.89%											
													Prediksi Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah											
5	01	03	2.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	17	5,831,349,504	1	436,264,662	8	678,250,000	0	36,609,000	0	0	0	2	2	2	36,609,000	16.25%	5.40%	3	472,873,662	17.65%	8.11%	Bidang IKE			
							Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	26		3		3		0								0				3						
5	01	03	2.03	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	17	2,444,587,920	5	199,121,763	5	295,000,000	0	14,544,000							0	14,544,000	20.00%	4.93%	5	213,665,763	29.41%	8.74%	Bidang IKE		
5	01	03	2.03	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	12	153,020,000	0	-	2	25,000,000	0	-							0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%	Bidang IKE		

No	Kode	Sasaran (RPJMD/Renstra)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 (Kumulatif 2021-2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024) n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang direvisasi n-1		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang direvisasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Keterangan										
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp								
																												I	II	III	IV	13 = 9+10+11+12	14=9-10/8*100%	15=7+13	16=15/6*100%
Predikat Kinerja																																			
5	05	02	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	14	3,172,964,800	0	-	2	750,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Sangat Rendah	Sangat Rendah	0	-	0.00%	0.00%	Bidang LITBANG		
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	5	1,536,482,400	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%	Bidang LITBANG	
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	5	1,018,241,200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%	Bidang LITBANG	
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	4	618,241,200	0	-	1	100,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%	Bidang LITBANG	
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	0	-	0	-	1	650,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%	Bidang LITBANG	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																																			
Predikat Kinerja																																			
5	05	02	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Laporan	10	1,896,899,166	1	242,823,624	2	379,400,000	0	-	14,604,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	14,604,000	25.00%	3.85%	1	257,427,624	10.00%	13.57%	Bidang LITBANG		
5	05	02	2.04	03	Diseminasi, Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi, Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	5	950,610,887	1	242,823,624	1	279,400,000	0	-	14,604,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	14,604,000	25.00%	5.23%	1	257,427,624	20.00%	27.08%	Bidang LITBANG	
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil, Hasil Ketibangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Ketibangan	Laporan	5	946,288,279	0	-	1	100,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%	Bidang LITBANG	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																																			
Predikat Kinerja																																			
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																			
Predikat Kinerja																																			
4	2	20	02	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	PROGRAM PENYELANGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	%	500	2,366,884,400	100	184,741,654	100	900,000,000	0	-	29,876,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	29,876,000	25.00%	17.21%	100	214,617,654	20.00%	9.07%	Bidang LITBANG	
2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan metadata statistik sektoral	%	500	2,366,884,400	100	184,741,654	100	900,000,000	0	-	29,876,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	29,876,000	25.00%	17.21%	100	214,617,654	20.00%	9.07%	Subid Statistik
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	5	924,321,600	1	184,741,654	1	300,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%	0.00%	1	184,741,654	20.00%	19.99%	Subid Statistik	
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	236	412,160,800	0	-	59	100,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%	Subid Statistik	
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	4	1,030,402,000	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%	Subid Statistik	
2	20	02	2.01	07	Peningkatan Kapasitas Keterbacaan Statistik Sektoral	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Statistik	Orang	0	-	0	-	40	150,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%	Subid Statistik	
2	20	02	2.01	09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Sifat Tepat Waktu	%	0	-	0	-	100	330,000,000	0	-	29,876,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	29,876,000	25.00%	17.21%	0	29,876,000	20.00%	19.99%	Subid Statistik	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																																			
Predikat Kinerja																																			
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																			
Predikat Kinerja																																			

No	Kode	Sasaran (RPJMD/Renstra)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 (Kumulatif 2021-2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024) n 2		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang direvisasi n 1		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang direvisasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Keterangan
												I		II		III		IV											
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=9-10/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%		17	18
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)													23.01%	12.29%			26.82%	17.72%											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)													Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :				Kerja sama antar bidang yang baik, sehingga capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja :				Kurangnya Sumber Daya Manusia (Personil)																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																													
*) Di Isi Oleh Kepala Bappelitbangda																													

2.2. Hasil Evaluasi Kesesuaian Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025 Terhadap APBD Tahun 2025

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 sudah menggunakan nomenklatur sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2.2.1 Kesesuaian Program antara Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025.

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada Rencana Kerja Bappelitbangda dengan APBD Tahun 2025, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah program dalam Renja sama dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 5 program.

2.2.2 Kesesuaian Kegiatan antara Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025.

Seperti halnya evaluasi program, untuk kegiatan yang ada di Renja Bappelitbangda, ada beberapa kegiatan yang tidak diakomodir pada APBD tahun 2025 sehingga tingkat kesesuaian kegiatan pada Renja dengan kegiatan pada APBD hanya 84,21% yaitu jumlah kegiatan yang ada dalam Renja Bappelitbangda sebanyak 19 kegiatan sedangkan jumlah kegiatan yang ada dalam APBD yaitu sebanyak 16 kegiatan.

2.2.3 Kesesuaian Sub Kegiatan antara Renja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025.

Untuk sub kegiatan yang ada di Renja Bappelitbangda terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak terakomodir di APBD tahun 2025. Jumlah sub kegiatan yang ada di renja Bappelitbangda Tahun 2025 sebanyak 59 sub kegiatan, sedangkan sub kegiatan yang ada dalam APBD Tahun 2025 yaitu sebanyak 49 sub kegiatan. Tingkat kesesuaian sub kegiatan Renja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 terhadap APBD Tahun 2025 yaitu sebesar 83,05%.

Tabel 2.3.
Kesesuaian Renja Bappelitbangda Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Renja 2025	APBD 2025
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			22.508.848.837	15.366.482.955
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			500.000.000	210.000.000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			500.000.000	210.000.000
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			500.000.000	210.000.000
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000	210.000.000
2	20	02	2.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Statistik	40 Orang	150.000.000	0
2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Rilis Tepat Waktu	100%	350.000.000	210.000.000
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			22.008.848.837	15.156.482.955
5	01				PERENCANAAN			20.630.948.837	14.638.482.955
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.811.698.513	11.683.483.055
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			350.000.000	242.000.000
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	215.000.000	147.000.000
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2 Laporan	35.000.000	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Renja 2025	APBD 2025
						Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	100.000.000	95.000.000
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.625.099.892	7.925.312.955
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	8.545.099.892	7.885.312.955
5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	40.000.000	0
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	40.000.000	40.000.000
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			350.000.000	0
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	350.000.000	0
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			991.522.061	967.964.850
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	168.136.061	216.604.850
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	55.213.000	50.194.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Renja 2025	APBD 2025
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	65.093.000	58.000.000
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	96.950.000	88.000.000
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	606.130.000	555.166.000
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.024.401.750	364.783.805
5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	2.000.000.000	285.000.000
5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	350.000.000	0
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	100.000.000	0
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	373.959.350	0
5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	200.442.400	79.783.805
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.394.400.810	1.293.737.100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Renja 2025	APBD 2025
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	546.300.810	496.637.100
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	848.100.000	797.100.000
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.076.274.000	889.684.345
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	385.752.000	350.675.000
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	186.481.000	169.525.000
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	186.589.000	169.588.000
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	317.452.000	199.896.345
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			2.610.000.000	1.382.500.000
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1.840.000.000	1.209.382.000
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	100.000.000	56.690.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Renja 2025	APBD 2025
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	250.000.000	372.550.000
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	200.000.000	104.540.000
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten /Kota	2 Berita Acara	750.000.000	232.450.000
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	702 Usulan	90.000.000	60.000.000
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	450.000.000	383.151.500
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			150.000.000	0
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	150.000.000	0
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			500.000.000	121.890.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Renja 2025	APBD 2025
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	14 Laporan	300.000.000	102.612.000
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	200.000.000	19.278.000
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			120.000.000	51.228.000
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	120.000.000	51.228.000
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			2.209.250.324	1.572.499.900
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			865.500.324	596.999.900
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	310.500.324	239.433.900
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	25.000.000	14.750.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Renja 2025	APBD 2025
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	30.000.000	23.816.000
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	450.000.000	284.500.000
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	20.000.000	14.750.000
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	30.000.000	19.750.000
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			665.500.000	503.000.000
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	287.000.000	205.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Renja 2025	APBD 2025
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	19.000.000	15.000.000
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	29.000.000	30.000.000
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	286.500.000	203.000.000
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	17.000.000	15.000.000
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	27.000.000	35.000.000
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			678.250.000	472.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Renja 2025	APBD 2025
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	295.000.000	200.000.000
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	25.000.000	25.000.000
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	27.500.000	25.000.000
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	278.250.000	172.500.000
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	25.000.000	25.000.000
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan	1 Laporan	27.500.000	25.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Renja 2025	APBD 2025
					Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.377.900.000	518.000.000
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			1.377.900.000	518.000.000
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			148.500.000	20.000.000
5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	148.500.000	20.000.000
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			100.000.000	195.000.000
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	100.000.000	-
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	-	195.000.000
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			750.000.000	0
5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	100.000.000	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Renja 2025	APBD 2025
5	05	02	2.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	650.000.000	0
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			379.400.000	303.000.000
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	279.400.000	269.000.000
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	100.000.000	34.000.000
TOTAL								22.508.848.837	15.366.482.955

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN
BAPPELITBANGDA KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025

Memperhatikan hasil capaian kinerja tahun 2024 dan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini akan dimuat tentang penyesuaian target kinerja yang tertuang pada tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya serta dimuat juga tentang kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja tahun 2024, maka pada target kinerja tujuan dan sasaran tahun 2025 dilakukan penyesuaian. Penyesuaian target kinerja tujuan dan sasaran Bappelitbangda Tahun 2025 dapat terlihat pada Tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4	5	10
1.	Mewujudkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	Poin	89,15

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4	5	10
		Daerah			
2.	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin	21,90
3.	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Pembangunan Daerah		Indeks Inovasi Daerah	Poin	49 (Inovatif)
		Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	Persen	100
4	Mewujudkan Satudata Sektoral Kabupaten Tasikmalaya		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi	Persen	100
		Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	100

3.2. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Secara ringkas dari total sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 terdapat 18 sub kegiatan yang dihapus, yaitu :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7. Pengadaan Mebel
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
11. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
12. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
13. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
14. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
15. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
16. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
17. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
18. Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

3.3. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2025

Kebijakan belanja pada perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang

disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2025;

2. Kegiatan yang sudah ada (kegiatan lanjutan) maupun penghapusan kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, dan yang tidak terakomodir dalam APBD serta dengan mempertimbangkan rasionalisasi anggaran, dan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta sisa waktu pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 terdiri dari 5 Program, 16 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp. 13.386.028.249,- sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2. dibawah ini :

Tabel 3.2.
Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				22,508,848,837	15,366,482,955	13,386,028,249							17,434,885,077	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				500,000,000	210,000,000	131,573,600							231,000,000	
2	20				500,000,000	210,000,000	131,573,600							231,000,000	
2	20	02			500,000,000	210,000,000	131,573,600							231,000,000	
2	20	02	2.01		500,000,000	210,000,000	131,573,600			-	Inovasi Pelayanan Publik	-		231,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2	20	02	2.01	0007											
2	20	02	2.01	0009											
5					22,008,848,837	15,156,482,955	13,254,454,649							17,203,885,077	
5	01				20,630,948,837	14,638,482,955	12,856,229,049							16,573,585,077	
5	01	01			15,811,698,513	11,683,483,055	10,895,980,829							13,037,085,187	
5	01	01	2.01		350,000,000	242,000,000	251,222,800			-	Inovasi Pelayanan Publik	-		266,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	215,000,000	147,000,000	158,494,000	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	161,700,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	35,000,000	-	-	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Inovasi Pelayanan Publik	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	100,000,000	95,000,000	92,728,800	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	104,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100%	100%	8,625,099,892	7,925,312,955	7,922,171,955		-	Inovasi Pelayanan Publik	8,721,835,877	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	8,545,099,892	7,885,312,955	7,885,312,955	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	8,677,835,877	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	40,000,000	-	-	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Inovasi Pelayanan Publik	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	40,000,000	36,859,000	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	44,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN Bappelitbangda	100%	100%	350,000,000	-	-					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	350,000,000	-	-	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Inovasi Pelayanan Publik		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100%	100%	991,522,061	967,964,850	724,667,845					967,151,900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	168,136,061	216,604,850	193,864,500	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		168,102,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	55,213,000	50,194,000	65,000,000	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		55,213,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	65,093,000	58,000,000	55,900,000	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		63,800,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	96,950,000	88,000,000	58,000,000	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		96,800,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	606,130,000	555,166,000	351,903,345	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		583,236,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	546,300,810	496,637,100	476,130,229	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		546,300,810	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	848,100,000	797,100,000	737,100,000	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		876,810,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	1,076,274,000	889,684,345	775,688,000			-	Inovasi Pelayanan Publik		1,076,024,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	385,752,000	350,675,000	280,540,000	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		385,742,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	186,481,000	169,525,000	114,850,000	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		186,477,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	186,589,000	169,588,000	183,218,000	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		186,546,800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	317,452,000	199,896,345	197,080,000	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		317,257,600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap RPJMD	100 %	100 %	2,610,000,000	1,382,500,000	916,395,400				1,696,750,000			
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah	710 Dokumen	710 Dokumen	1,840,000,000	1,209,382,000	791,433,800			-	Inovasi Pelayanan Publik		1,432,750,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah													
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	56,690,500	76,774,600	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		78,510,850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya													
						Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	372,550,000	215,985,600	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		495,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik													
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	200,000,000	104,540,000	44,420,600	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		110,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota													
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	750,000,000	232,450,000	121,128,000	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		255,695,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan													
						Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	702 Usulan	702 Usulan	90,000,000	60,000,000	44,345,000	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		66,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RP JMD/RKPD)	4 Dokumen	3 Dokumen	450,000,000	383,151,500	288,780,000	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik			427,544,150	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	150,000,000	-	-	Inovasi Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah											
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	-	-	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Inovasi Pelayanan Publik			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	17 Laporan	17 Laporan	500,000,000	121,890,000	75,762,600	-	Inovasi Pelayanan Publik	-	154,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota											
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	14 Laporan	14 Laporan	300,000,000	102,612,000	62,330,000	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik			110,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah											
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	200,000,000	19,278,000	13,432,600	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik			44,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	120,000,000	51,228,000	49,199,000	-	Inovasi Pelayanan Publik	-	110,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah											
		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000	51,228,000	49,199,000	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik			110,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJP D) lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	2,209,250,324	1,572,499,900	1,043,852,820					1,839,749,890		
						Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/SubKegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJP D) lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	100%											
						Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJP D) lingkup Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%											
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Dokumen	4 Dokumen	865,500,324	596,999,900	404,670,320			-	Inovasi Pelayanan Publik	-	695,199,890	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	54 Dokumen											
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	4 Dokumen	310,500,324	239,433,900	156,901,320	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik			263,377,290	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan										
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	9 Laporan	25,000,000	14,750,000	-	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik			22,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan										
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	9 Laporan	30,000,000	23,816,000	17,478,200	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik			31,972,600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	4 Dokumen	450,000,000	284,500,000	215,820,200	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik			328,350,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia										
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan	20,000,000	14,750,000	-	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik			22,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia										

Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan	30,000,000	19,750,000	14,470,600	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik			27,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Pembangunan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	4 Dokumen	4 Dokumen	665,500,000	503,000,000	337,958,400			-	Inovasi Pelayanan Publik	-	586,300,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	4 Dokumen	287,000,000	205,000,000	133,652,200	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		242,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	19,000,000	15,000,000	-	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		16,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	29,000,000	30,000,000	24,411,800	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		33,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	4 Dokumen	286,500,000	203,000,000	149,289,400	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		239,800,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA											
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	17,000,000	15,000,000	-	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	16,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA											
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	27,000,000	35,000,000	30,605,000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	38,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Dokumen	4 Dokumen	678,250,000	472,500,000	301,224,100		-	Inovasi Pelayanan Publik	558,250,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	4 Dokumen	295,000,000	200,000,000	129,856,300	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	220,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur											
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	25,000,000	25,000,000	-	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	27,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur											
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	27,500,000	25,000,000	19,528,000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	27,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	4 Dokumen	278,250,000	172,500,000	131,951,200	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	228,250,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan											
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	-	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	27,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan											
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	27,500,000	25,000,000	19,888,600	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	27,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1,377,900,000	518,000,000	398,225,600					630,300,000	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			1,377,900,000	518,000,000	398,225,600					630,300,000	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan											
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	3 Laporan	3 Laporan	148,500,000	20,000,000	13,547,200			-	Inovasi Pelayanan Publik	22,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi											
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	148,500,000	20,000,000	13,547,200	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	22,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan											
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	34,000,000	28,482,200	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	37,400,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JUMLAH							22,508,848,837	15,366,482,955	13,386,028,249					17,434,885,077		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan guna pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan daerah tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan pemantauan atau monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan yaitu dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, akan dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Singaparna, 23 Juli 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA


Drs. RUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670918 198903 1 007